



Pembahasan *Shortcut* Titik 5 dan 6

Proyek Digarap Mulai 2018

Dana pembebasan lahan sudah disiapkan lewat APBD Perubahan 2017, dan proyek segera digarap secara multiyears mulai 2018.

SINGARAJA, NusaBali

Kebutuhan lahan dalam pembangunan *shortcut* pada titik 5 dan 6 ruas jalan Bedugul-

Singaraja, mulai ada kepastian. Pemkab Buleleng pun mulai menyiapkan dana pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2017. Pembangunan *shortcut* yang berada di wilayah Desa Wanagiri dan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng itu dirancang secara multiyears mulai tahun 2018.

Rencana pembangunan *shortcut* tersebut kembali dibahas Kamis (8/6) pagi. Rapat pembahasan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka, melibatkan Dinas PU Pemprov Bali, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional

(BBPJN) Wilayah VIII, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buleleng, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Buleleng.

Sekda Puspaka usai rapat mengatakan, proyek *shortcut* pada titik 5 dan 6 akan dilaksanakan berkesinambungan atau multiyears oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang diperkirakan mulai tahun 2018. Saat ini masih dilakukan penyempurnaan Detail Engineering Design (DED), karena konstruksi dari *Shortcut* itu cukup canggih. "Bisa jadi model

Shortcut di titik 5 dan 6 ini paling canggih yang pernah dibuat oleh Kementerian PU. Karena itu dibangun secara Multiyears. Saat ini DED masih tahap penyempurnaan," kata Puspaka.

Masih kata Sekda Puspaka, menyusul rencana kegiatan tersebut, Pemkab Buleleng akan menyediakan lahan sesuai komitmen awal. Dalam pembahasan, luas lahan yang diperlukan dalam pembangunan *shortcut* titik 5 dan 6 mencapai 6,6 hektare. Jumlah ini jauh lebih luas dari perkiraan semula yakni 3 hektare.

Luas lahan yang diperlukan itu berdasarkan perkembangan

dari pembenahan DED. "Dalam pembangunan *shortcut* itu, Pemkab Buleleng sejak awal punya komitmen sediakan lahan. Berdasarkan DED (masih disempurnakan, red), kebutuhan lahan mencapai 6,6 hektare. Sekarang kita upayakan dananya mulai APBD Perubahan 2017," terang Sekda.

Sekda Puspaka mengungkapkan, kebutuhan dana untuk membebaskan lahan seluas 6,6 hektare itu akan dihitung dengan melibatkan tim independen. Namun, saat ini dana yang sudah siapkan untuk dialokasikan dalam pembebasan lahan sebesar Rp 7,6 miliar yang bersumber

dari pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Pemkab Badung. Sekda mengungkapkan, Pemkab Buleleng mendapat PHR dari Badung sebesar Rp 65 miliar. Dari total PHR itu, sebesar Rp 7,6 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk dana pembebasan lahan *shortcut*, karena sisanya sudah dialokasikan untuk penataan dan pembangunan kawasan wisata.

Sekda Puspaka berharap, Pemprov Bali juga ikut membiayai proses pengadaan lahan *shortcut* titik 5 dan 6. "Kita memang punya komitmen karena lahannya berada di wilayah Buleleng, tetapi saya juga berharap agar Pemprov Bali ikut menda-

nai pembebasan lahan itu. Kita masih menghitung berapa dana yang dapat kita tambahkan di APBD Perubahan 2017, kalau belum cukup kita upayakan di APBD Induk 2018," katanya.

Sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berharap pembahasan APBD Perubahan 2017, bisa dimajukan pada bulan Juni-Juli. "Saya akan koordinasi dengan rekan-rekan di DPRD, agar pembahasan APBD perubahan nanti bisa upayakan awal Juli, karena kita akan alokasikan dana pembahasan lahan di APBD perubahan," ujarnya. **k19**

Edisi : Jumat, 9 Juni 2017

Hal : 4